

## KERJASAMA AMERIKA SERIKAT – FILIPINA DALAM PERANG MELAWAN TERORISME DI FILIPINA

Irfan Nurhakim

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Komputer Indonesia  
Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132

E-mail : [irfan.nurhakim2895@gmail.com](mailto:irfan.nurhakim2895@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study discusses the cooperation between the United States and the Philippines in war on terrorism in the Philippines that began from 2001 until 2014. The United States helps the Philippines in war on terrorism because of the Al-Qaeda connection as the perpetrator behind 9/11 event with groups in the Philippines such as the Abu Sayyaf Group, MILF and Jamaah Islamiyah. This study uses data collection techniques through literature study because the data obtained comes from articles/magazines/internet/documents. Data analysis techniques using data reduction techniques so data that has been obtained from the article/magazine/internet/documents are reduced to be taken an important point. Based on the results obtained from 2001-2014, the strength of the Abu Sayyaf Group is reduced and has successfully overcome the conditions under which terrorism is born so that this cooperation can be said to succeed*

*Keywords: Terrorism, Abu Sayyaf, JSOTF-P, Balikatan, Global War on Terrorism.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang kerjasama antara Amerika Serikat dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina yang dimulai dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Amerika Serikat membantu Filipina dalam mengatasi permasalahan terorisme di negaranya karena adanya sangkut paut kelompok Al-Qaeda sebagai pelaku peristiwa 9/11 dengan kelompok di Filipina seperti ASG, MILF dan JI. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dikarenakan data-data yang didapat berasal dari artikel/tulisan/internet/dokumen. Teknik analisa data menggunakan teknik reduksi data yaitu data yang telah diperoleh dari studi pustaka di reduksi untuk diambil pokok penting. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari tahun 2001-2014, kekuatan kelompok ASG berkurang dan telah berhasil mengatasi kondisi-kondisi dimana lahirnya terorisme sehingga kerjasama ini dapat dikatakan berhasil.

Kata kunci: Terorisme, Abu Sayyaf, JSOTF-P, Balikatan, Global War on Terrorism.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Serangan 11 September 2001 merupakan serangkaian dari empat serangan terorisme terkoordinasi yang dilakukan oleh Al-Qaeda (Melalui History, 2010). Serangan 9/11 terjadi pada Selasa pagi, 11 September 2001. Serangan tersebut menewaskan kurang lebih 3000 orang dan melukai 6000 orang serta menyebabkan kerugian besar akibat kerusakan infrastruktur kurang lebih sebesar 10 milyar US Dollar dan kerugian secara keseluruhan yaitu tiga triliun US Dollar.

Kejadian tersebut bermula saat pembajak dari Al-Qaeda berjumlah 19 orang berhasil membajak pesawat penumpang *United Airlines* serta *American Airlines* lalu menabrakkan kedua pesawat tersebut ke menara kembar World Trade Center (WTC) di pusat finansial kota New York. Serangan tersebut berhasil meruntuhkan kedua menara kembar dalam kurun waktu dua jam.

Selain menabrakkan pesawat ke gedung WTC, pembajak juga berhasil menabrakkan pesawat ketiga ke gedung Pentagon di Arlington, Virginia. Sementara pesawat keempat gagal mencapai target utamanya di Washington D.C. sebelum akhirnya pesawat tersebut jatuh di sebuah lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Serangan tersebut menghancurkan simbol kedigdayaan ekonomi AS yang dilambangkan oleh gedung WTC dan simbol kedigdayaan militer AS yang dilambangkan oleh Gedung Pentagon.

Setelah tragedi 9/11, AS dibawah pemerintahan Bush mengeluarkan strategi dan kebijakan yang militeristik agar serangan serupa tidak lagi dapat menyerang AS di masa depan seperti dengan mengeluarkan *Quadrennial Defense Review Report (QDR)* dan disusul dengan *National Security Strategy (NSS)*. Kedua strategi tersebut merupakan gambaran bagaimana serangan 9/11 telah memberikan efek psikologis yang luar biasa bagi AS. Selanjutnya, Presiden AS George W. Bush mengemukakan tugas besar AS kedepan pada pidatonya di West Point yaitu AS akan memerangi terorisme global demi terjadinya

keamanan dan kedamaian dengan membangun hubungan yang baik dan akan memperluas perdamaian dengan mendorong masyarakat yang terbuka dan bebas.

Setelah itu, dalam merespon serangan 9/11, AS mengeluarkan kebijakan *Global War on Terrorism (GWOT)* dimana AS akan melakukan kampanye global dengan tujuan menyamakan pandangan mengenai terorisme yaitu dalam memerangi Al-Qaeda dan kelompok di dunia yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Karena bagi AS, kelompok manapun di dunia yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda harus diberantas dengan cara memberi bantuan militer bagi negara tersebut. Dalam kebijakan tersebut, AS akan memperkuat aliansi keamanan dan melakukan kerjasama internasional dengan negara di dunia untuk mengalahkan terorisme global dalam upaya mencegah serangan terhadap AS dan juga sekutu AS. Selain itu, menurut dokumen *National Strategy for Combating Terrorism*, AS juga akan memberikan dukungan dalam bentuk intelijen, pelaksanaan undang-undang dan bantuan militer kepada setiap pemerintahan di dunia yang berupaya memerangi terorisme serta memberikan perhatian lebih terhadap aliansi AS di kawasan Asia Tenggara.

Kawasan Asia Tenggara juga menjadi signifikan dalam kepentingan AS, dimana setelah Perang Dunia usai, AS memiliki perhatian pada negara-negara di kawasan Asia Timur dalam politik luar negerinya, tetapi setelah peristiwa 9/11, AS mengalihkan perhatiannya pada kawasan Asia Tenggara dalam politik luar negerinya. AS dalam kepentingannya di Asia Tenggara menyebut kawasan ini sebagai *the second front war on terrorism* karena pada kawasan tersebut terdapat kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Al-Qaeda yang merupakan pelaku yang bertanggungjawab dibalik serangan 9/11.

Al-Qaeda secara jelas memiliki hubungan dengan kelompok yang berada di wilayah Asia Tenggara yaitu JI yang berada di beberapa negara di kawasan tersebut. JI dan Al-Qaeda juga merupakan kelompok yang bertanggung

jawab atas terjadinya serangan Bom Bali pada tahun 2002 di Indonesia yang menyebabkan AS menganggap kawasan ini memiliki ancaman serius yang dapat mengancam stabilitas kawasan serta mengancam kepentingan AS yaitu dalam mengamankan warga AS dan sekutu AS di kawasan Asia Tenggara. Dalam kaset audio yang berisi rekaman suara, Osama Bin Laden menyatakan bahwa tragedi Bom Bali 2002 merupakan pembalasan secara langsung atas dukungan terhadap AS dalam GWOT dan adanya peran Australia dalam pembebasan Timor Leste karena dalam tragedi Bom Bali 2002 tersebut menewaskan banyak warga negara asal AS dan Australia (Melalui The Age Australia, 13 November 2002).

Di kawasan Asia Tenggara terdapat juga kelompok-kelompok lain yang berada di wilayah Filipina selatan. Di wilayah selatan tersebut merupakan basis dari kelompok Islam seperti di kepulauan Mindanao, Sulu, Basilan dan Palawan. Di wilayah tersebut diantaranya terdapat kelompok-kelompok seperti *Abu Sayyaf Group* (ASG), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), *Moro National Liberation Front* (MNLF), *Bangsamoro Islamic Freedom Fighters* (BIFF), *Maute Group*, dan *Khalifa Islamiyah Mindanao* (KIM) serta terdapat sebagian kecil JI yang berada di wilayah selatan Filipina.

Di Filipina selatan, Al-Qaeda membantu menyediakan pelatihan, pendanaan, dan indoktrinasi ideologi kepada kelompok utama teroris dan pemberontak separatis yaitu MILF dan ASG (Kumar dan Tan, 2003: 98). ASG memiliki hubungan dengan Al-Qaeda karena kelompok tersebut pernah mengirimkan anggotanya ke Afghanistan untuk diberi pelatihan serta kelompok tersebut pada awalnya mendapatkan dukungan dana dari Mohammad Jamal Khalifa yaitu saudara ipar Osama Bin Laden yang menikah dengan seorang wanita Filipina (Melalui ABC News, 20 Desember 2001).

Di Filipina juga terdapat kelompok komunis yaitu NPA yang menjadi ancaman bagi keamanan Filipina. Kelompok tersebut

merupakan ancaman dari wilayah utara Filipina. Menurut AS dalam daftar *Foreign Terrorist Organizations*, ASG (10/8/1997), JI (10/23/2002) dan Kelompok Komunis yaitu *New People's Army* (NPA) (8/9/2002) merupakan kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh *US Department of State*.

Filipina merupakan negara yang terus terang sebagai negara pendukung dalam sebuah koalisi global yang dipimpin AS untuk perang melawan terorisme. Al-Qaeda yang menyerang AS memiliki keterkaitan dengan kelompok yang berada Filipina. Oleh karenanya AS membantu Filipina dalam memerangi terorisme di Filipina karena adanya hubungan Al-Qaeda dengan kelompok di Filipina.

Kerjasama AS dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina termasuk kedalam kerjasama VFA, MDT dan *Kapit Bisig Framework*. Kerjasama-kerjasama tersebut menghasilkan program-program kerjasama dalam memerangi terorisme yaitu JSOTF-P dan Balikatan. Bentuk kedua program kerjasama tersebut adalah latihan militer dalam meningkatkan kapasitas AFP dan proyek bantuan kemanusiaan dalam mengurangi dukungan masyarakat lokal terhadap kelompok teroris.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah terbagi menjadi dua bagian yaitu rumusan masalah mayor dan minor sebagai berikut:

### Rumusan Masalah Mayor

“Bagaimana kerjasama Amerika Serikat dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina (2001-2014)?”

### Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah minor diantaranya sebagai berikut:

1. Apa saja program kerjasama yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Amerika Serikat - Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina?
3. Apa saja hasil program kerjasama Amerika Serikat dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina?
4. Bagaimana evaluasi dan prospek dari kerjasama Amerika Serikat dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina?

## 2. Kajian Pustaka Dan Kerangka

### Pemikiran

#### 2.1 Kerjasama Internasional

Di dalam kajian hubungan internasional, terdapat kerjasama internasional. Alasannya karena negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka, harus adanya kerjasama internasional sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan negara. Alasan lain terdapatnya kerjasama internasional adalah karena dalam kehidupan internasional terdapat berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Akibat berbagai bidang tersebut, muncul isu-isu yang berakar dari kepentingan yang multi dimensi sehingga harus adanya jawaban dengan cara kerjasama internasional (Perwita dan Yani, 2014: 33-34).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional terjadi karena adanya komitmen antar negara, kepercayaan antar negara dan keinginan dari negara yang melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negara-negara tersebut daripada suatu negara itu berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kerjasama tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam kerjasama internasional terdapat tujuan yang hendak dicapai negara-negara yang didasari pada kepentingan nasional

negara tersebut. Didalam kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip, norma dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional (Martin, 2007: 11). Kerjasama internasional juga merupakan suatu bukti adanya saling pengertian antar bangsa sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2014: 121).

#### 2.2 Kerjasama Keamanan

Menurut Dokumen *Green Book* dari *Defense Institute of Security Cooperation Studies* (DISCS), istilah kerjasama keamanan pertama kali diperkenalkan yaitu pada tahun 1997 oleh *Defense Reform Initiative* (DRI). DRI mengusulkan kepada Departemen Pertahanan AS untuk mendanai program-program internasional beserta personil-personil mereka dan SDM yang terkait untuk diatur oleh apa yang disebut dengan *Defense Security Assistance Agency* (DSAA).

Kerjasama keamanan yang dilakukan oleh AS diantaranya meliputi bidang-bidang pendidikan, pelatihan, pemberantasan narkoba, bantuan kemanusiaan, pertukaran informasi intelijen, kontra non-proliferasi; *defense and military contacts; defense support to public diplomacy* (Dyekman, 2007: 2).

Kerjasama keamanan menurut Douglas M. Faherty adalah kegiatan kerjasama keamanan semuanya terstruktur, terorganisir, dan dikelola secara formal yang mengatur interaksi antarnegara antara unit militer yang bermitra dan pemimpin-pemimpin mereka. Program kerjasama keamanan bercita-cita untuk membangun harapan bersama dengan negara-negara mitra sehingga bantuan militer mereka tersedia bila diperlukan. Rencana kerjasama keamanan harus mendukung tujuan nasional, memperluas pilihan kebijakan, dan menghilangkan potensi kejutan dari negara-negara mitra. Kerjasama keamanan harus sengaja dirancang sejak awal untuk mencapai tujuan tersebut” (2012: 1).

### 2.3 Keamanan Internasional

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca-Perang dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun, kini definisi keamanan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita dan Yani, 2014: 119).

Keamanan merupakan sebuah *contested concept* atau konsep yang masih diperdebatkan oleh para sarjana Hubungan Internasional jika dilihat dari berbagai literatur. Hal tersebut sangat beralasan karena dalam era globalisasi saat ini yang menyebabkan semakin kompleksnya hubungan antar negara membuat konsep keamanan semakin meluas maknanya serta didorong dengan meningkatnya interpendensi. Masalah keamanan yang harus menjadi perhatian lebih adalah isu terorisme yang telah menjadi tantangan besar, ancaman dan gangguan bagi keamanan nasional suatu negara dibuktikan dengan dijadikannya instrumen politik luar negeri yang memiliki keterkaitan dengan tujuan nasional maupun kepentingan nasional (Perwita dan Yani, 2014: 120-121).

### 2.4 Keamanan Non-Tradisional

Dalam memahami konsep keamanan, perlu diketahui terdapat pendekatan non-tradisional. Keamanan tradisional muncul akibat dari berkembangnya dimensi-dimensi keamanan dan adanya peran dari globalisasi yaitu perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Globalisasi telah memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas para individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati bahkan menghapus batas negara. Akibat dari globalisasi adalah munculnya aktor baru seperti kelompok penjahat lintas batas, gerakan separatis dan

kelompok teroris internasional (Perwita dan Yani, 2014: 125-126).

### 2.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang sangat vital karena merupakan suatu fundamental untuk dapat menjelaskan kepentingan dan perilaku luar negeri dari suatu negara. Selain itu dalam memahami perilaku internasional, sangat dibutuhkan konsep kepentingan nasional untuk dapat menjelaskannya (Perwita dan Yani, 2014: 35).

Kepentingan nasional juga dapat didefinisikan sebagai tujuan yang paling dasar dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling penting, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano dan Olton dalam Perwita dan Yani, 2014: 35).

### 2.6 Terorisme

Terorisme merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia karena terorisme tidak hanya mengancam keamanan suatu negara namun terorisme sudah mengancam keamanan global. Salah satu negara yang giat dalam mengkampanyekan perang melawan terorisme adalah AS. AS merupakan negara adidaya yang memberikan perhatian lebih terhadap isu terorisme, karena terorisme merupakan ancaman tingkat pertama bagi keamanan AS menurut dokumen NSS 2002 (Jackson dan Sorensen, 2013: 485). Kejadian 9/11 merupakan titik anjak (*starting point*) masyarakat dunia yang dipimpin AS untuk mendeklarasikan perang global melawan terorisme (Perwita dan Yani, 2014: 140). Namun, ada hal penting yang harus diingat yaitu terorisme pada dasarnya sudah ada selamanya dan mungkin akan terus ada (Mueller, 2004: 199).

Untuk memahami terorisme diperlukan suatu definisi yang dapat menggambarkan apa

yang disebut aksi atau tindakan terorisme. Namun, dalam mendefinisikan terorisme, muncul beberapa masalah misalnya pertama saat dua pakar terorisme meminta 100 orang yang bekerja pada bidang tersebut untuk mendefinisikan terorisme. Kuisisioner menghasilkan sebanyak 109 definisi mengenai apa itu terorisme (Weinberg dan Eubank, 2008: 186).

Masalah muncul saat terorisme dikaitkan dengan kekerasan revolusioner atau operasi yang mendukung tindakan politik dengan operasi lain yang tidak mendukung tindakan politik. Masalah kedua adalah menyangkut dimasukkan atau tidaknya terorisme yang disponsori negara. Dalam sejumlah kasus, negara-negara jelas telah mensponsori terorisme (Sluka, 2000 dalam Menjivar dan Rodriguez, 2005).

Masalah terakhir adalah dalam mendefinisikan terorisme muncul istilah 'orang sipil' sebagai target aksi terorisme. Istilah tersebut dalam beberapa situasi tidak benar sepenuhnya karena target dari serangan terorisme juga terjadi kepada personel militer yang sedang tidak bertugas. Sehingga istilah yang paling tepat dalam mendefinisikan terorisme adalah istilah 'bukan tentara' dalam menggantikan istilah 'orang sipil' (Jackson dan Sorensen, 2013: 486).

## 2.7 Global War On Terrorism

*Global War On Terrorism* (GWOT) merupakan kebijakan dan suatu deklarasi perang secara global melawan terorisme oleh AS setelah terjadinya serangan 9/11 dimana parameter dari perang tersebut masih belum jelas.

Pemerintah AS menyebutkan beberapa musuh yang akan dihadapi AS dalam GWOT yaitu *rogue states*, negara yang memiliki senjata pemusnah massal (*Weapon Mass Destruction*), organisasi teroris pada level global, regional, dan nasional termasuk terorisme itu sendiri dengan perhatian khusus terhadap kelompok teroris Al-Qaeda (Record, 2003: 5).

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan adanya keterkaitan antara Al-Qaeda dengan beberapa kelompok di Filipina dan dalam mengimplementasi kebijakan GWOT, AS melakukan kerjasama dengan Filipina dalam melawan terorisme di wilayah Filipina. Filipina merupakan negara yang dijadikan AS sebagai major non-NATO ally dan perang melawan terorisme di Filipina disebut AS sebagai *the second front war on terrorism*.

Selain terdapatnya keterkaitan, AS dan Filipina melakukan kerjasama dalam perang melawan terorisme karena adanya kepentingan nasional kedua negara. Bagi AS, kelompok manapun di dunia yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda harus di perangi dan adanya kepentingan AS dalam melindungi warganya yang berada di luar negeri menjadi kepentingan AS. Sementara kepentingan Filipina adalah dalam menciptakan keamanan di negaranya mengingat banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Filipina oleh kelompok militan.

Kerjasama antara AS dan Filipina dilakukan melalui kerjasama MDT dan VFA. Melalui landasan kerjasama tersebut terbentuklah program kerjasama antara AS dan Filipina dalam perang melawan terorisme yaitu melalui latihan militer bersama antara militer AS dan militer Filipina melalui Balikatan yang setelah terjadi serangan 9/11 lebih ditujukan dalam perang melawan terorisme.

Melalui landasan kerjasama tersebut juga terbentuklah program kerjasama JSOTF-P pada 2002 dalam perang melawan terorisme di wilayah selatan Filipina. Selain itu, pada 2014 terdapat pula kerjasama peningkatan pertahanan melalui EDCA sehingga AS dapat memiliki pangkalan militer di wilayah Filipina dan dapat menggunakan fasilitas instalasi militer Filipina dan akan terbentuknya program-program militer baru dengan meningkatnya kehadiran dan rotasi militer AS yang akan memudahkan kedua negara dalam perang melawan terorisme di Filipina.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Objek Penelitian

##### 3.1.1 Gambaran Hubungan AS dan Filipina

Filipina merupakan negara berdaulat yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan juga terletak di Samudera Pasifik bagian barat. Negara ini terikat oleh Laut Cina Selatan di sebelah barat, Laut Filipina di timur dan Laut Sulawesi di barat daya. Filipina juga berbagi perbatasan maritim dengan Taiwan di utara, Vietnam di barat, Palau di timur dan Malaysia serta Indonesia di Selatan.

Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7,641 pulau (Melalui Wheninmanila, 6 Maret 2017). Di Filipina terdapat tiga kepulauan besar yaitu Luzon, Visayas dan Mindanao. Wilayah kepulauan Mindanao yang terletak di Filipina selatan terdiri dari kepulauan utama seperti Basilan, Jolo, Tawitawi dan kepulauan lainnya dimana secara geografis kepulauan tersebut merupakan hutan belantara yang merupakan tempat dimana basis kelompok militan bersenjata berada. Negara Filipina beribukotakan di Manila sementara wilayah paling padat secara populasi adalah Quezon City dan kedua wilayah tersebut termasuk kedalam daerah Metro Manila.

##### 3.1.2 Hubungan Amerika Serikat dan Filipina

Hubungan AS dan Filipina dapat dilihat dari segi historis karena Filipina dahulu merupakan negara bekas koloni AS di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara memiliki hubungan yang kuat sejak dahulu hingga sekarang walaupun pada masa awal pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina akan mengurangi ketergantungan kepada AS dan akan lebih berhubungan dengan Cina (Melalui Reuters, 20 Oktober 2016). Namun, dengan telah terjalinnya hubungan pertahanan dengan AS, Filipina dibawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte akan tetap menghormati hubungan yang sudah ada seiring dengan dipilihnya Presiden Donald Trump yang dapat merubah

hubungan kedua negara untuk lebih baik (Melalui Inquirer, 9 November 2016).

##### 3.1.3 Kerjasama AS dan Filipina dalam Bidang Militer

AS dan Filipina memiliki hubungan militer yang erat dan sudah terjalin sejak lama sehingga dapat dilihat dari sisi historis yaitu sejak berlangsungnya perang dunia kedua dimana pada saat itu tentara Filipina membantu militer AS yang sedang berperang dalam pertempuran Pasifik. Setelah momen itu, kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama-kerjasama dalam bidang militer seperti ditandatanganinya beberapa perjanjian yaitu *Military Bases Agreement* (MBA), *Mutual Defense Treaty* (MDT), *Visiting Forces Agreement* (VFA) dan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA).

##### 3.1.4 Permasalahan Terorisme di Filipina

Terorisme merupakan isu sosial utama di Filipina dan terkait dengan konflik Moro serta pemberontakan NPA. Terorisme yang terjadi di Filipina selatan merupakan akibat dari adanya konflik Moro yang merupakan sebuah pemberontakan di wilayah Mindanao di Filipina selatan. Konflik Moro terjadi akibat adanya faktor sejarah masa lampau yaitu marginalisasi yang disebabkan kebijakan yang memaksa disertakannya wilayah Mindanao dan Sulu ke wilayah persemakmuran Filipina pada tahun 1935. Akibat hal tersebut, tensi politik mulai meninggi dan menyebabkan lahirnya konflik antara pemberontak Bangsamoro dengan Pemerintah Filipina.

Selanjutnya, terorisme di Filipina juga muncul akibat adanya pemberontakan CPP–NPA–NDF. Pemberontakan tersebut mengacu pada konflik yang sedang berlangsung antara pemerintah Filipina dan koalisi komunis dari *Communist Party of the Philippines* (CPP), *New People Army* (NPA), dan *National Democratic Front* (NDF). Koalisi tersebut berusaha menggulingkan

Pemerintah Filipina untuk mendirikan negara sosialis komunis melalui gerakan bersenjata.

### 3.1.5 Landasan Hukum Terorisme di Filipina

Karena isu terorisme di Filipina semakin menjadi masalah besar dan dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme, pada tahun 2007 dibentuklah undang-undang terorisme yaitu *Human Security Act of 2007* yang memuat landasan hukum mengenai terorisme. Undang-undang tersebut dirancang untuk meredam terorisme di Filipina mengingat permasalahan di wilayah Filipina selatan tidak kunjung selesai akibat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi. Dengan adanya landasan tersebut diharapkan dapat memberikan efek penggetaran dalam mencegah dan mengatasi isu terorisme.

### 3.1.6 Kelompok Teroris di Filipina

Berdasarkan keberadaan kelompok teroris yang telah sejak lama berada di Filipina, maka kelompok teroris yang memiliki eksistensi di Filipina merupakan kelompok teroris yang salah satunya terdaftar di daftar *Foreign Terrorist Organization* (FTO) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS.

Kelompok teroris di Filipina antara lain ASG yang ditetapkan sebagai kelompok teroris pada tanggal 10/8/1997, JI pada 10/23/2002 dan *New People Army* pada 8/9/2002 (Melalui Office of the Coordinator for Counterterrorism, 9 Desember 2015). ASG juga telah dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh pengadilan di wilayah Basilan (Melalui Inquirer, 12 September 2015).

### 3.1.7 Pelaksana *Global War On Terrorism* di Filipina

Perang melawan terorisme di Filipina yang merupakan bagian dari kebijakan *Global War On Terrorism* dilaksanakan oleh militer Filipina dan militer AS. Militer Filipina yaitu AFP bertugas dalam melaksanakan upaya perang melawan

terorisme dengan dibantu oleh pihak kepolisian Filipina yaitu PNP.

Sementara itu, militer AS yang bertugas membantu AFP dan PNP merupakan personel militer AS yang tergabung kedalam *The United States Special Operations Command* (USSOCOM). Di Filipina, USSOCOM menurunkan pasukan dari *Special Operations Command Pacific* (SOCPAC) yang juga merupakan bagian dari *United States Pacific Command*.

## 3.2 Analisa Hasil Penelitian

### 3.2.1 Program Kerjasama Amerika Serikat dan Filipina dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina

Kerjasama AS dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina termasuk kedalam kerjasama MDT, VFA dan Kerangka Kapit Bisig. Kerjasama MDT merupakan dasar dari kerjasama tersebut. VFA merupakan kerjasama yang mengatur kehadiran militer AS di wilayah kedaulatan Filipina. Sementara Kerangka Kapit Bisig merupakan dasar dari kampanye AS dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina.

Kerjasama AS dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina yaitu dari tahun 2001 hingga 2014 terbagi kedalam dua periode pemerintahan Filipina yaitu masa administrasi Arroyo dan Aquino. Dua periode pemerintahan tersebut memiliki perbedaan.

Pada masa administrasi Arroyo, kerjasama AS dan Filipina dalam memerangi terorisme lebih intensif. Hal tersebut dapat dimengerti karena pada masa tersebut, kekuatan ASG sedang dalam puncaknya dengan banyaknya anggota yang dimiliki serta adanya indikasi hubungan Al-Qaeda dengan ASG dan JI.

Pada masa administrasi Aquino, kerjasama AS dan Filipina dalam memerangi terorisme lebih menggunakan cara *soft*. Hal tersebut dapat dimengerti karena adanya program kontra-radikalisme serta pada masa

tersebut kekuatan ASG tidak sekuat pada masa administrasi Arroyo.

Selanjutnya dalam upaya memerangi terorisme di Filipina, terdapat program kerjasama yang dilakukan kedua negara yaitu melalui JSOTF-P dan Balikatan. JSOTF-P lebih berfokus di Filipina Selatan dengan menggabungkan beberapa upaya yaitu pelatihan, proyek bantuan kemanusiaan, pengumpulan data dan informasi intelijen dan operasi informasi.

Program kerjasama selanjutnya adalah Balikatan dimana didalamnya terdapat latihan gabungan militer AS dan militer Filipina serta terdapat misi *humanitarian assistance* yang berguna untuk meminimalisir dukungan masyarakat lokal terhadap kelompok teroris serta meningkatkan legitimasi AFP.

### **3.2.2 Kendala Kerjasama AS dan Filipina Dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina**

Terdapat kendala-kendala dalam perang melawan terorisme di Filipina antara lain faktor di lapangan yaitu faktor geografis yang menyulitkan dalam memerangi ASG. Kelompok ASG sangat memahami faktor geografis dimana mereka beroperasi karena anggota ASG merupakan orang yang berasal dari wilayah mereka beroperasi sehingga mereka sangat paham dengan medan pertempuran mereka. Sehingga pada level taktis, kelompok ASG sudah sangat paham dengan medan mereka bersembunyi sehingga mereka sangat mengetahui setiap sudut dan celah di medan tersebut.

Medan pertempuran dapat berupa wilayah perairan, kepulauan dan hutan belantara, sehingga menyulitkan pihak militer dalam hal mobilitas pergerakan dan dalam menangkap anggota ASG.

Kendala lain adalah wilayah dimana ASG berada merupakan wilayah yang miskin, infrastruktur dan sarana pendidikan yang tidak memadai dan memiliki kehadiran pihak pemerintahan yang terbatas seperti kurangnya kehadiran pihak kepolisian sehingga jika Pemerintah Filipina dapat menghadirkan

pihak pemerintahan disana akan membantu mengeliminasi *safe havens*.

### **3.2.3 Hasil Kerjasama AS dan Filipina Dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina**

Dalam upaya perang melawan terorisme di Filipina yang termasuk kedalam kebijakan AS yaitu *Global War On Terrorism* (GWOT), terdapat beberapa hasil yang dicapai oleh kedua negara dalam perang melawan terorisme di Filipina. Kerjasama tersebut berhasil mengurangi kapasitas dan kapabilitas kelompok teroris ASG dan JI dengan tewasnya beberapa pimpinan kunci dari kelompok-kelompok tersebut. Pimpinan kunci yang tewas antara lain Khadafy Janjalani, Abu Solaiman, Komandan *Black Killer* dan Zulkifli Bin Hir alias Marwan.

Keberhasilan lain adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas militer Filipina yaitu AFP yang dibantu PNP akibat dari pelatihan, nasihat dan dukungan yang diberikan militer AS melalui latihan-latihan yang diberikan guna meningkatkan kemampuan personil AFP dan PNP.

Selain itu, akibat dari intensifnya proyek bantuan kemanusiaan yang diberikan kedua negara, sehingga dapat mengurangi dukungan masyarakat lokal terhadap kelompok teroris sehingga kelompok teroris tersebut dapat menurun dari segi kapabilitas.

### **3.2.4 Evaluasi dan Prospek Kerjasama AS dan Filipina dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina**

Evaluasi dari kerjasama AS dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina dapat dievaluasi bahwa kerjasama tersebut dapat mengurangi kapasitas dan kapabilitas kelompok teroris di Filipina terutama ASG.

Hal tersebut dapat dilihat dari upaya AS dan Filipina yang tidak hanya menggunakan jalur militer saja, namun menggabungkan dua jalur dalam memerangi terorisme. Dua jalur tersebut adalah jalur militer dan non-militer.

Jalur militer dilakukan melalui latihan-latihan militer yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta berguna bagi AFP dalam memerangi kelompok teroris. Jalur non-militer adalah melalui proyek bantuan kemanusiaan sehingga pengaruh kelompok teroris dapat diminimalisir.

Sementara prospek dari kerjasama AS dan Filipina dalam memerangi terorisme di Filipina memiliki prospek yang bagus dengan adanya peningkatan kerjasama militer melalui EDCA. Kerjasama militer melalui EDCA menurut otoritas Filipina dalam masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte salah satunya akan berfokus pada upaya kontra-terorisme.

Dengan adanya EDCA, militer AS dapat memiliki pangkalan militer non-permanen di wilayah Filipina yang telah disetujui. Namun, dalam menyelesaikan permasalahan terorisme di Filipina tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi dibutuhkan waktu yang lama dalam menyudahi terorisme di Filipina.

#### 4. Kesimpulan Dan Saran

##### 4.1 Kesimpulan

Kerjasama AS dan Filipina dalam perang mealwan terorisme di Filipina termasuk kedalam kerjasama MDT, VFA dan Kerangka Kapit Bisig. Kerjasama tersebut terbagi kedalam dua periode pemerintahan yaitu masa administrasi Presiden Arroyo dan Presiden Aquino. Program kerjasama yang telah dilakukan adalah melalui JSOTF-P dan Balikatan.

Dalam kerjasama tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti dari faktor geografis dilapangan. Namun, selain terdapat kendala, terdapat juga keberhasilan dalam memerangi terorisme di Filipina yaitu dengan adanya beberapa pimpinan kunci dari kelompok teroris yang tewas terbunuh dalam operasi militer.

Evaluasi dari kerjasama AS dan Filipina dalam memerangi terorisme di Filipina dinilai dapat mengurangi kapasitas dan kapabilitas kelompok teroris. Sementara itu dari segi

prospek kerjasama tersebut memiliki prospek yang bagus dengan adanya peningkatan kerjasama dalam bidang militer yaitu melalui EDCA.

##### 4.2 Saran

Dalam memerangi terorisme yang terjadi di Filipina, maka terdapat beberapa saran, yaitu antara lain perlu adanya upaya serta program kerjasama baru dibawah kerjasama EDCA, perlunya kerjasama antara negara-negara yang berdekatan dengan Filipina seperti Malaysia dan Indonesia agar pengaruh terorisme tidak masuk ke negara-negara tetangga Filipina dan perlunya upaya dari pemerintah Filipina serta pemerintah AS dalam meningkatkan pembangunan di Filipina selatan dari segi ekonomi dan sosial dikarenakan permasalahan terorisme di Filipina salah satunya terjadi karena faktor kemiskinan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

- Amitav Acharya and Arabinda Acharya, *The Myth of the Second Front: Localizing the War on Terror in Southeast Asia*, *The Washington Quarterly*. Autumn 2007, p. 87
- Banlaoli, Rommel. 2010. *Philippine Security in the Age of Terror: National, Regional and Global Challenges in the Post 9/11 World*. CRC Press Taylor and Francis Group: Boca Raton, Florida, USA.
- Faherty, Douglas M. 2012. *Harnessing International Relations Theory to Security Cooperation Program Design*. United States Army War College
- General Headquarter of the AFP, *Internal Peace and Security Plan*, Bayanihan (Quezon City: Armed Forces of the Philippines Headquarters, 2010), p.12
- Gregory J. Dyekman. 2007. *Security Cooperation: A Key to the Challenges of the 21st Century*. Strategic Studies Institute.

- Holsti, K.J. 2009. Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis. Bandung: Bina Cipta.
- IBP USA. 2012. Philippines Company Laws and Regulations Handbook. International Business Publication USA: Washington DC.
- James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 2000. Contending Theories of International Relations. Pearson.
- John Baylis dan Steve Smith. 2001. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. United Kingdom: Oxford University Press.
- Kartasasmita, Koesnadi. 2004. Organisasi dan Administrasi Internasional. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Kumar Ramakhrisna dan Tan See Seng. 2003. After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia. Singapore: Nanyang Technological University Institute of Defence and Strategic Studies.
- Mark T. Berger dan Heloise Weber. 2010. War Peace and Progeress In The 21st Century: Development Violance and Insecurity. England: Routledge Abingdon Oxon.
- Martin, Lisa L. 2007. Neo Liberalism in International Relations Theories: Discipline and Diversity. United Kingdom: Oxford University Press.
- Menjivar, C. dan Rodriguez, N. 2005. When States Kill: Latin America, the US and Technologies of Terror. Austin, Texas: University of Texas Press.
- Mueller, J. 2004. The Remnants of War. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Perwita dan Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Russell Hiang-Khng Heng, Denis Hew Wei-Yen. 2003. Regional Outlook: Southeast Asia 2003-2004. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.
- Santos, Soliman, Jr. 2005. Dynamics and Directions of the GRP-MILF Peace Negotiations. Davao City, Philippines: Alternate Forum for Research in Mindanao, Inc.
- USA-Philippines. 2009. Philippines Diplomatic Handbook. International Business Publications: USA.

#### **Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal:**

- Abuza, Zachary. 2010. The Philippines Chips Away at the Abu Sayyaf Group's Strength. CTC Sentinel, April 2010. Vol.3
- Banlaoli, Rommel. 2012. Crime-Terrorism-Insurgency Nexus in the Philippines. Philippines Institute of Peace Violence and Terrorism Research.
- Chalk, Peter. 2008. US Security Assistance to Philippines: A Success Story Against Terrorism. CTC Sentinel. February 2008. Vol.1
- Guerrero, Rustico. 2002. Philippine Terrorism and Insurgency: What to do About The Abu Sayyaf Group. USMC Marine Corps University: Virginia USA.
- International Crisis Group. 2008. The Philippines: Counter-insurgency vs. Counter-terrorism in Mindanao.
- Rivera, Carla. 2012. U.S.-Philippines Cooperation on Terrorism: the Fight Against the Abu Sayyaf Group Since 9/11. Georgetown University: Washington D.C.

Robinson, Linda, Johnston Patrick dan Oak Gilian. 2016. U.S. Special Operations Forces in the Philippines, 2001–2014. Rand Corporation: Santa Monica, California, USA.

Weinberg, L., dan Eubank, W. 2008. Problems with the Critical Studies Approach to the Study of Terrorism. *Critical Studies on Terrorism* ½: 185-195.

#### **Dokumen:**

Central Intelligence Agency. 2003. National Strategy for Combating Terrorism.

Defense Institute of Security Cooperation Studies. 2017. Green Book.

Department of Homeland Security. 2008. National Strategy Homeland Security. dalam [http://faculty.maxwell.syr.edu/rdenever/NatlSecurity2008\\_docs/NationalStrategy\\_HomelandSecurity.pdf](http://faculty.maxwell.syr.edu/rdenever/NatlSecurity2008_docs/NationalStrategy_HomelandSecurity.pdf)

File Presentasi Briefing JSOTF-P 2008.

International Council on Human Rights Policy. 2008. Talking about Terrorism Risks and Choices for Human Rights Organisations.

U.S. Department of Defense. 2001. Quadrennial defense Review: Defense Strategy dalam <http://archive.defense.gov/pubs/qdr2001.pdf>

United Nations. 1996. The Draft Comprehensive Convention on International Terrorism

US Department of State. 2003. Patterns Of Global Terrorism, dalam <https://www.state.gov/documents/organization/31912.pdf>

Philippine Defense Newsletter. 2014. An Evolving Partnership The PHL-US Enhanced Defense Cooperation Agreement: A Step Forward in

Maintaining Security and Stability in the Region.

#### **Rujukan Elektronik:**

ABC News. 2001. The Abu Sayyaf - Al Qaeda Connection dalam <http://abcnews.go.com/International/story?id=79205&page=1>

Inquirer. 2015. Basilan court declares ASG terrorist group dalam <http://newsinfo.inquirer.net/721376/basilan-court-declares-asg-terrorist-group>

Inquirer. 2016. Duterte congratulates Trump, wishes 'enhanced PH-US relations' dalam <http://globalnation.inquirer.net/149274/duterte-congratulates-trump-wishes-enhanced-ph-us-relations>

Office of the Coordinator for Counterterrorism. 2015. Foreign Terrorist Organizations U.S. State Department dalam <https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>

Parkinsons, Tony. 2002. 'Bin Laden' voices new threat to Australia dalam <http://www.theage.com.au/articles/2002/11/13/1037080786315.html>

Reuters. 2016. Duterte aligns Philippines with China, says U.S. has lost dalam <https://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUSKCN12K0AS>

When in Manila. Philippines Now Has 7641 Islands dalam <http://www.wheninmanila.com/read-the-philippines-now-has-7641-islands/>